



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021



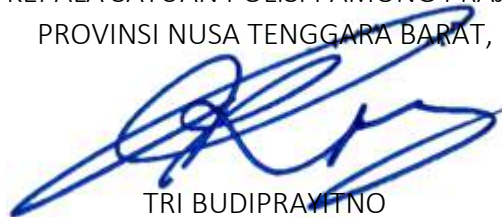
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Laporan ini menguraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Pencapaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan perbandingan antara Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 dengan realisasi kinerja Tahun 2021 dalam tugas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah yang merupakan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini merupakan laporan dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran sesuai Renstra 2019-2023. Disadari bahwa dalam laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terutama dalam menampilkan beberapa pengukuran serta analisis kinerja yang dihasilkan, karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan selalu diharapkan. Akhirnya semoga LAKIP ini memberi manfaat bagi tercapainya hajat bersama yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih baik dan akuntabel dimasa-masa mendatang. Terima kasih.

Mataram, 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP : 19681016 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
DAFTAR LAMPIRAN	IV
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	3
1.3.1. Tugas dan Fungsi.....	3
1.3.2. Struktur Organisasi.....	4
1.3.3. Sumber Daya Manusia	5
1.3.4. Sarana dan Prasarana.....	9
1.4. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	12
2.1.1. Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	13
2.1.3. Indikator Kinerja Utama	14
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	17
3.1.1. Target dan Realisasi Kierja Tahun 2021.....	17
3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2019, 2020 dan 2021	24
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	26
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi	27
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.1.6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	29
3.2. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d September 2020	6
Tabel 1. 2 Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per September 2020 ..	6
Tabel 1. 3 Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Septmebr 2020.....	7
Tabel 1. 4 Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d September 2020.	8
Tabel 1. 5 Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020.....	9
Tabel 1. 6 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020.....	9
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023	14
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi NTB	15
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021.....	16
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021	17
Tabel 3. 2 Jumlah Perda/Perkada Provinsi NTB yang Ditegakkan Tahun 2021	18
Tabel 3. 3 Rincian Perda/Perkada Provinsi NTB yang Dilanggar Tahun 2021	19
Tabel 3. 4 Kecamatan se-NTB dengan Gangguan Tibumtranmas Tahun 2021	22
Tabel 3. 5 Capaian Indikator Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi ≥Baik Tahun 2021	23
Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021.....	24
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah	27
Tabel 3. 8 Anggaran Perubahan Satpol PP Provinsi Tahun 2021	28
Tabel 3. 9 Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB.....	30
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021	33

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
LAMPIRAN 2	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LAMPIRAN 3	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2021
LAMPIRAN 4	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LAMPIRAN 5	LAPORAN CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
LAMPIRAN 6	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAMPIRAN 7	RENCANA AKSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8	SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
LAMPIRAN 9	NAMA ADMINISTRATOR SAKIP 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 serta untuk menggambarkan potret keberhasilan atau kegagalan, hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahan masalah dari serangkaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2021 anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda bersumber dari anggaran DPA SKPD (APBD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anggaran DPA SKPD (APBD) sebesar Rp17.978.482.379,00 realisasi anggaran sebesar Rp16.761.364.937,00 (93,23%) dan sisa anggaran sebesar Rp1.217.117.442,00 (6,77%). Adapun rincian alokasinya untuk Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp16.511.565.579,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.942.633.788,00 (96,55%) dan sisa anggaran sebesar Rp568.931.791,00 (3,45%). Sedangkan alokasi untuk Belanja Modal sebesar Rp1.466.916.800,00 dengan realisasi anggaran Rp818.731.149,00 (55,81%) dan sisa anggaran Rp598.127.651,00 (44,19%).

Satpol PP Provinsi NTB telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis untuk periode tahun 2019-2023 yang diukur dengan mengaplikasikan 3 indikator kinerja dan 3 target kinerja. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB pada Tahun 2021 adalah sebesar 94,45%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	%
1.	Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	20.00 %	18.92%	94.59%
2.	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	60.68 %	53.85%	88.74%
3.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	2.56 %	2.56%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					94.45%

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wilayah menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi, dan Meteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Kasus-kasus yang Berindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1.3.1. Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah pengemban amanat Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur secara tegas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan kewenangan Satpol PP diatur dalam Pasal 255 ayat (2) yaitu: a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengatur tugas Satpol PP yaitu: a. menegakkan Perda dan Perkada; b.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan fungsi Satpol PP diatur dalam Pasal 6 yaitu: a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan Polisi Pamong Praja dipertegas dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.3.2. Struktur Organisasi

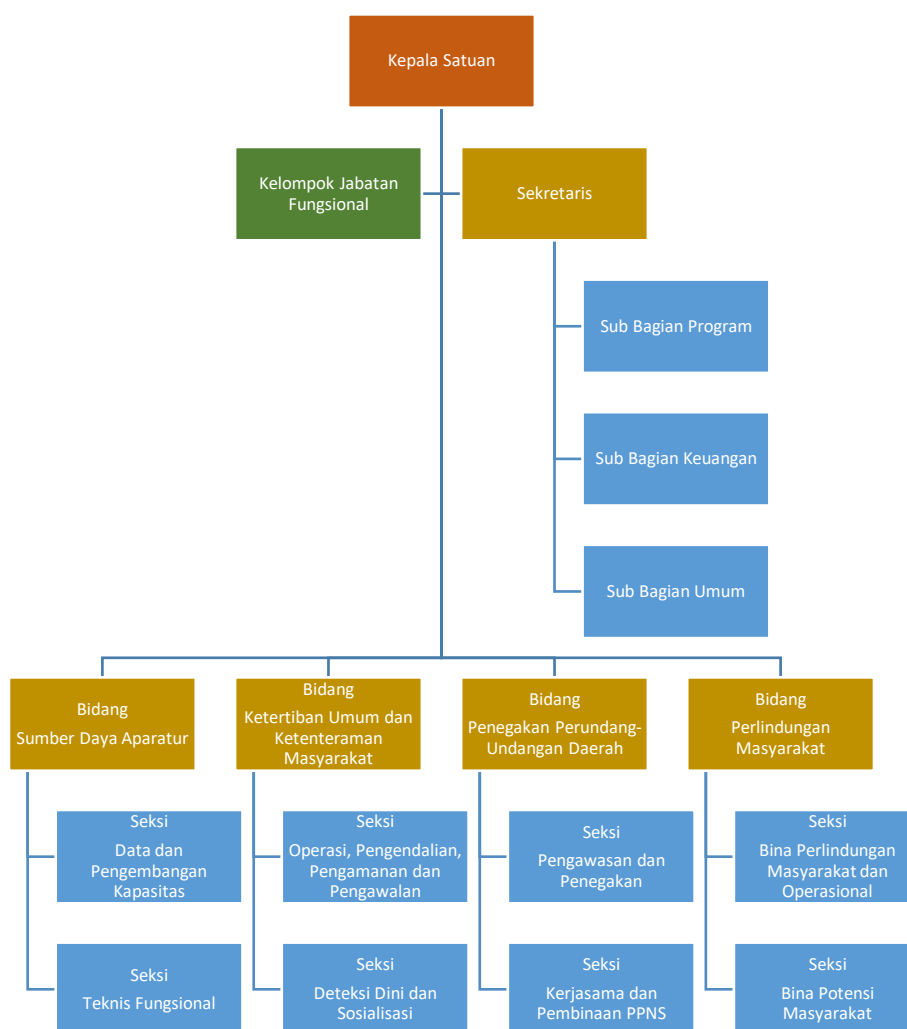
Struktur organisasi yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor

44 Tahun 2017 dijabarkan ke dalam Struktur Organisasi dan Kelembagaan Satpol PP Provinsi NTB setingkat dinas merupakan eselon II dengan tipe A menyelenggarakan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran), mencakup struktur sebagai berikut: 1 (Satu) jabatan eselon II.a atau **Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama** bagi Kepala Satuan, 5 (Lima) jabatan eselon III.a atau **Jabatan Administrator** bagi Sekretaris dan Kepala Bidang serta 11 (Sebelas) jabatan eselon IV.a atau **Jabatan Pengawas** bagi Kepala Sub Bagian/Seksi.

Gambar 1. 1

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB



1.3.3. Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung sumber daya aparatur PNS dan PTT yang telah ditetapkan menjadi personil Satpol PP sesuai keputusan Gubernur. Dukungan personil yang ada berlatar

belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Pasca Sarjana (S2) keadaan sampai September 2020 berjumlah 144 orang, terdiri dari: PNS berjumlah 143 orang dan PTT berjumlah 1 orang, dengan jenjang pendidikan didominasi tamatan SLTA. Sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. 1

Keadaan PNS dan PTT Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin s/d September 2020

Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah (Orang)	Persentase Jenjang Pendidikan terhadap Jumlah	Jenis Kelamin		Persentase Jenis Kelamin terhadap Jumlah
	PNS	PTT					
SD	2	-	2	1.39	Wanita	23	15.97
SLTP	2	-	2	1.39			
SLTA	77	1	78	54.17			
SM/D3	2	-	2	1.39	Pria	121	84.03
S1	53	-	53	36.81			
S2	7	-	7	4.86			
TOTAL	143	1	144	100		144	100

Sumber : Data Satpol PP NTB

Sementara sebaran personil menurut jenis kelamin didominasi oleh pria sebanyak 121 orang (84,03 persen), sisanya wanita sejumlah 23 orang atau sebesar 15,97 persen dari jumlah keseluruhan personil yang ada. Sedangkan keadaan PNS dan PTT menurut golongan dan usia sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. 2

Keadaan PNS dan PTT Menurut Golongan dan Usia per September 2020

Golongan/ Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase Golongan Terhadap Jumlah (%)	Kelompok usia	Jumlah (Orang)	Persentase Kelompok Usia Terhadap Jumlah (%)
PTT	1	0.69	<25 tahun		-
I	2	1.39	26 - 30 tahun	2	1.39
II	74	51.39	31 - 35 tahun	15	10.42
III	59	40.97	36 - 40 tahun	35	24.31
IV	8	5.56	41 - 45 tahun	34	23.61
			46 - 50 tahun	40	27.78
			51 - 55 tahun	13	9.03
			>56 tahun	5	3.47
TOTAL	144	100	TOTAL	144	100.00

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dari tabel diatas menggambarkan golongan ruang kepangkatan personil yang ada saat ini yaitu didominasi oleh golongan II dan golongan III, dengan kelompok usia rata-rata antara 31 s.d 50 sebanyak 86,12 persen atau 124 orang, usia antara 51 s.d >56 sebanyak 12.5 persen atau 18 orang dan hanya 1,39 persen atau 2 orang personil yang berusia 30 tahun ke bawah. Dipihak lain, Kebutuhan ideal personil Satpol PP Provinsi NTB sesuai analisis dan kajian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, seharusnya berjumlah minimal 360 orang, keadaan riil sumber daya Satpol PP saat ini sebesar 40% (144 orang) dari kebutuhan ideal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 256 ayat (1) mengatur bahwa Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah anggota Satpol PP yang telah menjadi pejabat fungsional Polisi Pamong Praja sampai dengan keadaan bulan September 2020 sebanyak 37 orang atau 24% dari jumlah anggota dan fungsional lainnya sebanyak 3 orang atau 2% dari jumlah anggota, sisanya sebesar 62% belum menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

Jumlah personil yang menduduki jabatan struktural sampai bulan September 2020 berjumlah 17 orang. Adapun data menurut jabatan, eselonering, pangkat/golongan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1. 3

Jumlah Dalam Jabatan Struktural Menurut Jabatan, Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin s/d Septmebr 2020

No	Jabatan	Eselon				Golongan/Ruang						Jenis Kelamin	
		Ila	IIla	IVa	Jumlah	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kepala	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-
2	Sekretaris	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
3	Kepala Bidang	-	4	-	4	-	2	1	1	-	4	4	-
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	-	-	11	11	-	-	3	8	-	11	9	2
Jumlah		1	5	11	17	1	2	5	9	0	17	14	3

Sumber : Data Satpol PP NTB

Dalam rangka meningkatkan keterampilan dan profesionalisme anggota serta produktivitas kinerja pelayanan bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dilakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan baik melalui pendidikan dan pelatihan: Diklat penjenjangan, dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 1. 4

Jenis Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Yang Telah Diikuti s/d September 2020.

No	Jenis Diklat	Jumlah Yang Telah Mengikuti Diklat	Jumlah Yang Belum Mengikuti Diklat	Keterangan
1	Diklatpim IV	10 orang	1 orang	Telah dilakukan koordinasi dengan PD yang memiliki kewenangan melaksanakan Diklat.
2	Diklatpim III	4 orang	1 orang	
3	Diklatpim II	1 orang	-	
Jumlah		15 orang		
4	Diklat Dasar Pol PP Pola 300 JP	90 orang	36 orang	
5	Diklat PPNS	3 orang	-	

Sumber : Data Satpol PP NTB

Kondisi sampai 2020 terdapat 17 Pejabat struktural, dimana pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjang sebanyak 15 orang atau 88 persen sedangkan yang belum mengikuti sebanyak 2 orang atau 12 persen. Sedangkan personil yang telah mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 90 orang atau sebesar 70.86 persen, dan yang belum mengikuti diklat dasar sebanyak 36 orang atau 28.34 persen dari 126 orang anggota Satpol PP.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP, dilakukan pembagian tugas rutin yang bersifat tetap dan situasional meliputi: tugas rutin administrasi, dan ketertiban umum berupa: pengamanan dan pengawalan objek vital Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kantor Gubernur dan Pendopo serta objek vital strategis lainnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Termasuk pengamanan situasional sesuai agenda daerah baik berupa pengamanan lokasi kegiatan maupun tamu pemerintah daerah. Adapun formasi penugasan personil secara internal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 5

Distribusi Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Struktural	17 Orang	
2	Petugas Piket	39 Orang	Piket 1 x 24 jam pada 7 pos pengamanan
3	Petugas Pengamanan dan Pengawasan Gubernur / Wakil Gubernur	12 Orang	Melakukan pengamanan dan pengawasan di lapangan
4	Petugas Pengamanan Dalam	5 Orang	Melakukan pengamanan pada lingkungan ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten.
5	Regu Sigap	24 Orang	Mendukung semua unsur tugas teknis Satpol PP
6	Petugas Administrasi	47 Orang	Melakukan pengadministrasian pada sekretariat dan masing-masing bidang.
Jumlah		144	Orang

*Sumber: Data Satpol PP NTB***1.3.4. Sarana dan Prasarana**

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda, POL PP didukung sarana dan prasarana, sebagai berikut:

Tabel 1. 6

Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja s/d September 2020

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kendaraan bermotor :	33 unit	-	28 unit	3 unit	
a	Roda empat	13 unit	2005 s/d 2019	11 unit	2 unit	
b	Roda dua	20 unit	2007 s/d 2019	18 unit	2 unit	
2	Pendingin ruangan (AC)	12 unit	2007 s/d 2019	10 unit	2 unit	
3	Alat komunikasi :	25 unit	-	21 unit	4 unit	

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
a	Handy Talky/Radio HF/FM	15 unit	2019	15 unit	-	
b	Reviter	1 unit	2019	1 unit	-	
c	Megaphone	2 unit	2008	2 unit	-	
d	Radio Rig	3 unit	2019	3 unit		
e	Peralatan Antena VHF/FM	1 unit	2010	-	-	1 unit
f	Antena Penerima VHF	1 unit	2013	-	-	1 unit
g	Handy Takly Werwey	2 unit	2010	-	-	2 unit
4	Kumputer :	29 unit	-	26 unit	3 unit	-
a	Laptop	10 unit	2010 s/d 2019	7 unit	3 unit	-
b	Personal Komputer (PC)	3 unit	2012-2019	3 unit	-	
c	Personal Komputer (AIO)	7 Unit	2014 s.d 2017	7 Unit		
d	Printer Laser Jet	2 unit	2015	2 unit		
e	Printer Laser Jet Pro	2 unit	2017	2 unit		
f	Printer Epson	5 unit	2019	5 unit		
5	Alat Elektronik :	23 unit	-	8 unit	-	
a	Proyektor/ LCD	1 unit	2011	1 unit	-	
b	Absensi sidik jari	1 unit	2013	1 unit	-	
c	Camera Video	1 unit	2012	1 unit	-	
d	Camera foto	2 unit	2012-2015	2 unit	-	
e	Wireles	2 unit	2008 s.d 2017	2 unit		
f	Camera CCTV	1 unit	2015	1 unit		
g	UPS/ICA	15 unit	2011 s.d 2017	Sebagian rusak berat		
6	Meubelair	186 unit	2007-2012	186 unit	-	
7	Alat Keamanan :	422 unit	-	422 unit	-	
a	Hand Metal Detector	2 buah	2006	2 buah	-	
b	Helm Dalmas	10 buah	2006	10 buah	-	

No	Nama Jenis Barang	Jumlah Barang	Tahun Pembelian	Kondisi		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
c	Helm PHH	67 buah	2012	67 buah	-	
d	Tongkat	125 buah	2005 s/d 2012	125 buah	-	
e	Tameng	189 buah	2005 s/d 2012	189 buah	-	
f	Rambu jalan	20 buah	2012	20 buah	-	
g	Rompi Anti Peluru	9 buah	2006	9 buah	-	

Sumber: Data Satpol PP NTB

1.4. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Adapun rumusan isu strategis Satpol PP Provinsi NTB terhadap gangguan tibumtranmas dan konflik sosial ditengah masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.
2. Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang berisi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya visi dan misi tersebut diturunkan menjadi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam kebijakan dan program yang disusun sesuai aturan dan pedoman yang ada.

2.1.1. Visi dan Misi

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Visi yang merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju organisasi atau keadaan masa depan yang diinginkan agar Nusa Tenggara Barat dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi tersebut adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG”**. Selanjutnya Visi tersebut dilengkapi dengan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut: NTB Tangguh dan Mantap, NTB Bersih dan Melayanai, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Asri dan Lestari, NTB Sejahtera dan Mandisi, serta NTB Aman dan Berkah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e) ketenteraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f) sosial. Berdasarkan urusan tersebut, Satpol PP mendukung pencapaian 2 (dua) misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu Misi 4 “NTB Asri dan Lestari” dan Misi 6 “NTB Aman dan Berkah”.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan 4) memenuhi kriteria SMART-C.

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2019-2023, serta tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah **Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB** dengan Indikator **Angka Pelanggaran Tibumtranmas (*Public Disorder Rate*)**. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dicapai. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					FORMULASI
				2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB		Angka Pelanggaran Tibumtranmas (<i>Public Disorder Rate</i>)				9	7	5	$\frac{\Sigma \text{Pelanggaran tibumtranmas}}{\Sigma \text{Penduduk NTB}} \times 100\%$
	Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/ perkada yang dilanggar	%			20.00	17.14	14.29	$\frac{\Sigma \text{Perda/ perkada yang dilanggar}}{\Sigma \text{Perda/ perkada}} \times 100\%$
	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%			60.68	61.54	62.39	$\frac{\Sigma \text{Wilayah bebas gangguan tibumtranmas}}{\Sigma \text{Wilayah se-NTB}} \times 100\%$
	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	%			2.56	5.00	7.14	$\frac{\Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun N} - \Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun (N-1)}}{\Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun (N-1)}} \times 100\%$

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB merupakan indikator kinerja yang berdasarkan pada Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran.

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi NTB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/KETERANGAN
Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/ perkada yang dilanggar	$\frac{\Sigma \text{Perda/ perkada yang dilanggar}}{\Sigma \text{Perda/ perkada}} \times 100\%$
Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	$\frac{\Sigma \text{Wilayah bebas gangguan tibusmtranmas}}{\Sigma \text{Wilayah se-NTB}} \times 100\%$
Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	$\frac{\Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun N} - \Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun (N-1)}}{\Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi } \geq \text{Baik Tahun (N-1)}} \times 100\%$

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Perjanjian kinerja antara lain:

- a) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Secara khusus tujuan Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dengan demikian Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, juga sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja aparatur sekaligus sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian Kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Perjanjian Kinerja Kepala Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menurunnya perda/ perkara yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	20.00 %
2.	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	60.68 %
3.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	2.56 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra. Hasil pengukuran kinerja tersebut mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama satu tahun dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2021 dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 serta formulir Perjanjian Kinerja yang mencakup Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target yang hendak dicapai, program/kegiatan/sub kegiatan sebagai cara pencapaian indikator beserta anggaran yang dialokasikan.

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan capaian pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Capaian Sasaran Strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Menurunnya perda/ perkara yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	20.00%	18.92%	94.59%
2.	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	60.68%	53.85%	88.74%
3.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas Satlimas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	2.56%	2.56%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					94.45%

Tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja adalah 94,45% yang mencerminkan kinerja Satpol PP selama Tahun 2021 dalam kategori “Sangat Baik”.

1) Persentase Perda/Perkada yang dilanggar

Berdasarkan jumlah perda yang ditegakkan pada Tahun 2021 yaitu 37 Perda dan jumlah perda yang dilanggar pada Tahun 2021 yaitu 7 Perda, diperoleh persentase perda/perkada yang dilanggar sebesar 94,59%.

Tabel 3. 2

Jumlah Perda/Perkada Provinsi NTB yang Ditegakkan Tahun 2021

Jumlah Perda/Perkada yang dilanggar		Jumlah Perda/Perkada		Persentase Perda/Perkada yang dilanggar		
Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
7	7	35	37	20.00	18.92	94.59

Indikator Persentase Perda/Perkada yang dilanggar merupakan indikator negatif, semakin rendah capaian indikator menunjukkan semakin sedikit jumlah Perda/Perkada yang dilanggar. Pada Tahun 2021, jumlah Perda/Perkada yang dilanggar sesuai dengan perkiraan target sedangkan jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan bertambah 2 (dua) Perda/Perkada. Hal ini menyebabkan realisasi capaian Persentase Perda/Perkada yang dilanggar melebihi target karena angka capaian lebih rendah dari perkiraan target yang artinya jumlah Perda/Perkada yang dilanggar pada Tahun 2021 lebih kecil terhadap jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan. Berikut adalah rincian Perda/Perkada yang dilanggar pada Tahun 2021:

Tabel 3.3
Rincian Perda/Perkada Provinsi NTB yang Dilanggar Tahun 2021

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KETERANGAN			
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI					
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH				
1.	Peraturan Gubernur NTB nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke 2 Peraturan Gubernur NTB No 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemprov. NTB	1. Tidak apel pagi (TAP)	346 orang pelanggar	43 Badan/Kantor/Biro yang ada di Lingkup Pemprov. NTB	-	-	Melakukan teguran lisan kepada penanggung jawab kepegawaian pada Perangkat Daerah	390 orang	Dilaksanakan pada : A. Sidak Biro-Biro. 1. Senin, 7 Juni 2021 a. Pagi Jam 07.15 wita b. Siang Jam 14.00 wita 2. Selasa, 8 Juni 2021 a. Pagi jam 07.15 wita b. Siang jam 14.00 wita 3. Rabu, 9 Juni 2021 a. Pagi Jam 07.15 wita b. Siang Jam 14.00 wita 3. Kamis, 10 Juni 2021 a. Pagi Jam 07. 00 wita b. Siang Jam 14.00 wita B. Sidak OPD Paska Hari Raya Idul Fitri 1442 H Senin, 17 Mei 2021			
	2. Tidak masuk kantor tanpa keterangan (TK)	44 orang pelanggar										
2.	Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok	1. Belum tersedia tempat khusus merokok sesuai ketentuan pasal 3 dan 4 Pergub Prov. NTB Nomor 17 Tahun 2015.	23 Kantor/Dinas Lingkup Pemprov. NTB		-	-	Melakukan sosialisasi penerapan Perda NTB Nomor 3 Tahun 2014 dan Pergub Prov. NTB Nomor 17 Tahun 2015, yaitu : - Kepala Dinas wajib menyediakan tempat khusus merokok sesuai pasal 3 dan 4 Pergub Prov. NTB Nomor 17 Tahun 2015. - Kepala Dinas wajib memasang tanda/petunjuk di tempat khusus merokok. - Melarang merokok di sembarang tempat	23 lokasi	Sosialisasi Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tempat Khusus Merokok, dilaksanakan dar tanggal 13 April 2021 sampai dengan 13 Mei 2021			
3.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tempat Khusus Merokok	2. Belum semua tempat terpasang tanda/petunjuk di tempat khusus merokok.										
		3. Belum dipatuhi larangan merokok di sembarang tempat										
4.	Perda 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Zero Waste)	Masyarakat Masih banyak yang membuang sampah di aliran sungai	5 Sungai di Kecamatan Sekotong Lombok Barat	- Sungai Pandaan - Sungai Tibu Petung - Sungai Karang Krem - Sungai Tibu Ireng - Sungai Dodokan	-	-	Pemantauan dan Pengawasan Zero Waste di Kawasan aliran sungai		Dilaksanakan oleh Tim, yaitu : 1. Satpol PP Prov. NTB 2. PUPR Lobar 3. Dinas LH Lobar 4. Staf Kecamatan Sekotong Lombok Barat			
5.	- Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.	1. Tidak menggunakan masker ditempat/fasilitas umum	88 pelanggar	Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya	-	-	1. Menerapkan sanksi denda sebesar Rp. 150.000,-	1 orang	Sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kegiatan dari tanggal 23 Maret 2021 s/d 25 Maret 2021			
6.	- Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin				-	-	2. Menerapkan sanksi Sosial	84 orang				

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
	dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19				-	-	3. Membuatkan Surat Peringatan	3 orang	
		2. Tidak menyiapkan sarana proses Covid-19	Toko tempat usaha		-	-	a. memberikan Surat Peringatan I (SP I) b. memberikan Surat Pernyataan (tidak ada)	Toko tempat usaha 1. Toko Boxy 2. Toko Tani Subur	
7. 8.	Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak Peraturan Gubernur NTB Nomor 38 tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu	- Mendatangkan Produk Hewan Ternak berupa telur dari luar daerah (Bali) tanpa ijin dari Gubernur	4 Pelanggar	1. UD.Enggal Jaya Pasar sweta 2. UD.Minang Abiantubuh Cakranegara 3. UD.Sugih Makmur Cakra UD.Raja Telur Karang Baru			1. Membuatkan Surat pernyataan Memberikas surat teguran I	1Kasus	1. 1 Orang ijinnya sudah ada atas nama UD.Enggal Jaya. Ijin No : 507/03-25/DPTM&PTSP/2021 2. 1 Orang dibuatkan surat teguran 2 Orang perijinan dalam proses
9. 10.	- Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah - Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Operasi Gabungan Kendaraan Bermotor	- Kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang tidak membayar pajak kendaraan	Kendaraan yang terjaring sebanyak 142 Pelanggar					1 Kasus	Operasi Penegakan Perda 9 Tahun 2017 dilaksanakan Hari Rabu, 13 Oktober 2021 terdiri dari : 1. Satpol PP Prov NTB 2. Polda NTB 3. Dinas Perhubungan Prov NTB 4. Bapenda Prov NTB 5.
11.	Perda No. 14 Tahun 2018 tentang Irigasi	Melakukan Penambangan Pasir Tanpa Izin	1 Pelanggar	Desa Sikur Kec. Masbaik, Kab. Lotim			Memberikan teguran lisan	1 Kasus	1. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 2. Telah diberikan surat peringatan (SP 1 s.d SP 3) oleh Satpol PP Kab. Lotim
12. 13. 14.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - Perda Provinsi NTB No. 11 Tahun 2020 tentang APBD Tahun 2021 - Pergub No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Pergub No. 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	Tidak melekatkan pita cukai pada barang hasil tembakau (rokok/tembakau iris kemasan)	10 Pelanggar 10 Pelanggar 14 Pelanggar 10 Pelanggar 19 Pelanggar	Kecamatan Montong Gading dan sekitarnya Kab. Lotim Kecamatan Sikur dan sekitarnya Kab. Lotim Kecamatan Batukeliang dan sekitarnya Kab. Loteng Kecamatan Kopang dan sekitarnya Kab. Loteng Kecamatan Narmada dan sekitarnya Kab. Lobar			Penyitaan Barang Bukti 5725 gram TIS dan 336 batang rokok Penyitaan Barang Bukti 2620 gram TIS dan 100 batang rokok Penyitaan Barang Bukti 2787 gram TIS dan 167 batang rokok Penyitaan Barang Bukti 2560 gram TIS dan 24 batang rokok Penyitaan Barang Bukti 3732 gram TIS dan 16 batang rokok	1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus 1 Kasus	Operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan 8 Desember 2021 oleh Tim terpadu. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram Operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan 8 Desember 2021 oleh Tim terpadu. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram Operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan 9 Desember 2021 oleh Tim terpadu. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram Operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan 9 Desember 2021 oleh Tim terpadu. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram Operasi bersama pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dilaksanakan 10 Desember 2021 oleh Tim terpadu. Barang bukti ditegah/disita oleh Bea Cukai Mataram

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
15.	- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Pedagang tembakau iris kemasan yang tidak melekatkan pita cukai	25 Pedagang	Pasar Jelajok Kopang Lombok Tengah	-	-	Sosialisasi	25 Pedagang	Dilaksanakan pada tanggal 5 April 2021
			25 Pedagang	Pasar Gerung Lombok Barat	-	-	Sosialisasi	25 Pedagang	Dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021
			25 Pedagang	Pasar Baretais Sweta Sandubaya Kota Mataram	-	-	Sosialisasi	25 Pedagang	Dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021
TOTAL ATURAN YANG DITEGAKKAN			14 Jenis (7 Perda, 6 Pergub dan 1 PMK)						
TOTAL KASUS			11 Kasus						
TOTAL PELANGGAR			689 Pelanggar						
TOTAL TINDAKAN NON YUSTISI			12 Kali						

2) Persentase Wilayah Bebas Gangguan Tibumtranmas

Indikator Persentase Wilayah Bebas Gangguan Tibumtranmas dihitung berdasarkan wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan yang bebas dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Provinsi NTB memiliki wilayah administratif kecamatan sejumlah 117 Kecamatan. Berdasarkan data dari seluruh Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTB, pada Tahun 2021 terdapat 54 Kecamatan yang mengalami gangguan tibumtranmas sehingga sisanya sebanyak 63 Kecamatan atau 53,85% bebas gangguan tibumtranmas. Berikut adalah data rincian kecamatan bebas gangguan tibumtranmas Provinsi NTB Tahun 2021:

Tabel 3.4
Kecamatan se-NTB dengan Gangguan Tibumtranmas Tahun 2021

Data	Kabupaten/Kota										Nusa Tenggara Barat
	Kota Mataram	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten Bima	Kota Bima	Kabupaten Dompu	
Jumlah Kecamatan	6	10	5	12	21	24	8	18	5	8	117
Jumlah Kecamatan bebas gangguan tibumtranmas	3	6	0	6	10	20	5	8	0	5	63
Jumlah Kecamatan dengan gangguan tibumtranmas	3	4	5	6	11	4	3	10	5	3	54
	1. Kec. Sekarbela	1. Kec. Kuripan	1. Kec. Bayan	1. Kec. Praya	1. Kec. Sukamulia	1. Kec. Batulanteh	1. Kec. Brang Ene	1. Kec. Wawo	1. Kec. Rosanae Barat	1. Kec. Pekat	
	2. Kec. Mataram	2. Kec. Narmada	2. Kec. Kayangan	2. Kec. Batukliang Utara	2. Kec. Masbagik	2. Kec. Orong Telu	2. Kec. Selongkang	2. Kec. Tambora	2. Kec. Rosanae Timur	2. Kec. Kilo	
	3. Kec. Selaparang	3. Kec. Lingsar	3. Kec. Gangga	3. Kec. Batukliang	3. Kec. Sikur	3. Kec. Lenagguar	3. Kec. Jereweh	3. Kec. Sanggar	3. Kec. Raba	3. Kec. Kempo	
		4. Kec. Kediri	4. Kec. Tanjung	4. Kec. Kopang	4. Kec. Terara	4. Kec. Ropang		4. Kec. Wera	4. Kec. Asakota		
			5. Kec. Pemenang	5. Kec. Praya Tengah	5. Kec. Pringgasela			5. Kec. Ambalawi	5. Kec. Empunda		
				6. Kec. Pringgarata	6. Kec. Selong			6. Kec. Langoda			
					7. Kec. Sakra Timur			7. Kec. Monta			
					8. Kec. Sakra Barat			8. Kec. Palipelo			
					9. Kec. Montong Gading			9. Kec. Soromandi			
					10. Kec. Suralaga			10. Kec. Lambitu			
				11. Kec. Lenek							

3) Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi \geq Baik

Peran Satpol PP tingkat provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas) adalah pemberdayaan masyarakat khususnya Anggota Satlinmas yang melekat di desa/kelurahan. Pada Tahun 2021, Satpol PP Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan terhadap 320 Anggota Satlinmas yang tersebar di desa/kelurahan se-NTB. Sebagai hasil dari pembinaan tersebut dilakukan evaluasi penilaian dengan 4 (empat) hasil kategori dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Berdasarkan 320 Anggota Satlinmas yang telah dibina, diperoleh 21 Anggota dengan nilai Sangat Baik dan 59 Anggota dengan nilai Baik sehingga jika dijumlahkan untuk yang memiliki nilai \geq Baik (lebih besar atau sama dengan Baik) adalah sebanyak 80 Anggota Satlinmas. Kemudian dibandingkan dengan jumlah pada Tahun 2020 yang dihitung sesuai formulasi, maka capaian terhadap indikator Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi \geq Baik Tahun 2021 adalah 2,56% atau mencapai target. Rincian perolehan indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 5
Capaian Indikator
Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi \geq Baik
Tahun 2021

Σ Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik 2021 *orang	Σ Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik Tahun 2020 *orang	Indikator Persentase Peningkatan Anggota Satlinmas dengan Nilai Evaluasi \geq Baik		
		Target	Capaian	%
80	78	2.56	2.56	100

3.1.2. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja pada Tahun 2019, 2020 dan 2021

Dalam menentukan keberhasilan suatu capaian pada tahun berjalan dapat diketahui dengan membandingkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Satpol PP Provinsi NTB pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019			2020			2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Menurunnya perda/ perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	14.71%	14.71%	100%	17.14%	17.14%	100%	20.00%	18.92%	94.59 %
3.	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	60.68%	53.85%	88.74 %
4.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2.56%	2.56%	100%

Sasaran strategis dan indikator kinerja nomor 1 (satu) dari tabel di atas merupakan berdasarkan Renstra murni Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dimana sebelum perubahan yakni pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, Satpol PP Provinsi NTB memiliki satu sasaran dengan dua indikator yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Persentase Penyelesaian Pelanggaran Produk Hukum Daerah. Kedua indikator tersebut dihitung berdasarkan penanganan kasus gangguan tibumtranmas dan

pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan. Capaian selalu mencapai 100% karena semua kasus yang diadukan dan ditemukan akan ditangani kemudian diselesaikan.

Selanjutnya untuk Tahun 2021 s.d Tahun 2023, Satpol PP Provinsi NTB merumuskan kembali sasaran dan indikator yang lebih berbasis kinerja mengikuti hasil evaluasi dan Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sasaran dan indikator kinerja dirumuskan berdasarkan tugas yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, sasaran strategis Satpol PP Provinsi NTB adalah Menurunnya Perda/ Perkada yang dilanggar oleh masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Perda/Perkada yang dilanggar. Berdasarkan data penanganan kasus yang dilaksanakan Satpol PP Provinsi NTB pada Tahun 2019, terdapat 5 Perda yang dilanggar dari 34 Perda yang ditegakkan sehingga diperoleh persentase Perda/Perkada yang dilanggar yaitu 14,71%. Tahun 2020, terdapat 6 Perda yang dilanggar dari 45 Perda yang ditegakkan sehingga persentase Perda/Perkada yang dilanggar yaitu 17,14%. Capaian yang fluktuatif dari Tahun 2019 s.d 2021 disebabkan jumlah Perda yang ditegakkan berbeda sehingga pembandingan angka berbeda. Selain itu, jumlah anggaran perangkat daerah setiap tahun juga mempengaruhi kuantitas penanganan dan penyelesaian kasus sehingga jumlah Perda yang dilanggar menjadi kurang konsisten.

Dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, sasaran strategis Satpol PP Provinsi NTB adalah Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas dengan indikator kinerja Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas. Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik. Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya kedua sasaran dan indikator tersebut merupakan hasil perubahan Renstra Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sehingga masih terdapat kendala dalam perolehan data. Indikator Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas Tahun 2019 dan Tahun 2020 belum dapat dihitung karena terbatasnya data yang diperoleh

dari Satpol PP kabupaten/kota. Indikator Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak dapat dihitung karena tidak ada evaluasi penilaian terhadap pembinaan yang dilakukan terhadap Anggota Satlinmas pada tahun berkenaan.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB disusun berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan juga disertai dengan indikator kegiatan berdasarkan bidang kewenangan dan arah kebijakan pembangunan. Adapun komponen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja terdiri 1 (satu) tujuan, dan 3 (tiga) sasaran yang dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021 dimana menjadi program utama yang mencerminkan Tupoksi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan secara periodik perlunya upaya penyempurnaan/revisi baik secara parsial maupun menyeluruh jika ditemukannya suatu perubahan lingkungan strategis yang signifikan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian Misi ke-6 (enam) Gubernur Nusa Tenggara Barat “NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan”, maka perlu ditetapkan tujuan yang berkaitan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamog Praja dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB adalah: “Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB”. Sedangkan Sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun dengan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan didukung dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, berikut adalah perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah Satpol PP Provinsi NTB:

Tabel 3. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			RENSTRA 2021		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	20.00%	18.92%	94.59 %	20.00%	18.92%	94.59 %
2.	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	60.68%	53.85%	88.74 %	60.68%	53.85%	88.74 %
3.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	2.56%	2.56%	100%	2.56%	2.56%	100%

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Permasalahan dalam pencapaian target kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang masih kurang;
- b. Sarana prasarana penunjang masih belum memadai akibatnya pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi seperti belum memiliki gedung kantor sendiri, kondisi kendaraan/sarana mobilitas yang sudah berumur tua dan rusak;
- c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Satpol PP Provinsi NTB masih belum memadai khususnya dalam menjangkau cakupan wilayah tugas Provinsi NTB;
- d. Dengan adanya pandemi *Covid-19* serta *refocusing* anggaran tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan massa. Sebagian kegiatan targetnya dikurangi bahkan di nol-kan. Dalam hal tersebut, dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, sinergi serta rapat-rapat melalui *Zoom Meeting* baik dengan Pemerintah Pusat, *Stakeholder* serta dengan Kabupaten/Kota;

- e. Cakupan wilayah yang luas meliputi dua pulau yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, menyebabkan kesulitan dalam melakukan upaya penegakan perda/perkada, meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan pencapaian target kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait;
- b. Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh personil dengan memberikan pengarahan-pengarahan dan latihan-latihan secara berkala.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam pengelolaan sumber daya keuangan tentu saja tidak mengganggu/menghambat efektifitas pencapaian tujuan organisasi tersebut. Demikian pula Satpol PP Provinsi NTB senantiasa melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran tanpa mengabaikan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Renstra Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Tabel 3. 8

Anggaran Perubahan Satpol PP Provinsi Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran 2021		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15,485,813,816	15,347,780,679	(138,033,137)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264,933,700	211,692,500	(53,241,200)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,552,838,206	12,656,013,459	(896,824,747)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12,125,700	2,525,700	(9,600,000)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154,830,000	22,770,000	(132,060,000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	649,592,110	479,269,420	(170,322,690)

Program/Kegiatan	Anggaran 2021		
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1,159,735,000	1,159,735,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312,214,100	308,394,600	(3,819,500)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539,280,000	507,380,000	(31,900,000)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,864,180,600	2,630,701,700	(233,478,900)
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,453,974,100	1,527,282,900	73,308,800
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1,245,480,000	1,053,419,000	(192,061,000)
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	164,726,500	49,999,800	(114,726,700)
TOTAL	18,349,994,416	17,978,482,379	(371,512,037)

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2021 ditetapkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebesar Rp16.761.364.937,00 (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 93,23% dari ketetapan DPPA SKPD (APBD-P) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2021. Efisiensi anggaran sebesar Rp1.217.117.442.00 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau 6,77%.

3.1.6. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Satpol PP Provinsi NTB

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100 %	100 %
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	13 Kasus
		Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	1 Perjanjian Kerjasama	1 Perjanjian Kerjasama
		Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	12 Kali	0 Kali
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	18 Kasus	11 Kasus
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	12 Kali	22 Kali
			Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	12 Kali	15 Kali
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	18 Kasus	11 Kasus
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	43 Orang	0 Orang
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	40 Orang	0 Orang
Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	3 Orang		0 Orang		

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Berkas	1 Berkas
			Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	1 Kali	0 Kali
			Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	4 Jenis	0 Jenis
2	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibuntranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100 %	100 %
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	13 Kasus
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	12 Kali	12 Kali
			Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	10 Kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota
			Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	10 Sekolah	0 Sekolah
			Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	10 Kegiatan	10 Kegiatan

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	17 Kasus	13 Kasus
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	2 Kali	1 Kali
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	18 Kasus	11 Kasus
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	10 Kali	9 Kali
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100 %	100 %
			Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100 %	100 %
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	13 Kasus
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	1 Kali	1 Kali
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	100 Orang	0 Orang
			Jumlah Anggota Satlinmas Yang	400 Orang	320 Orang

No	Kebijakan Strategis	Urusan Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja		
			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
			Mengikuti Gelar Pasukan		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	675 Orang	75 Orang
			Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	50 Orang	60 Orang
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	18 Kasus	11 Kasus
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	10 Kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/ Kota

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10
Realisasi Anggaran Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17,978,482,379	16,761,364,937	93.23	93.23
<i>Belanja Operasi</i>	<i>16,511,565,579</i>	<i>12,537,598,970</i>	<i>69.74</i>	
Belanja Pegawai	12,514,960,659	12,366,328,970	74.89	
Belanja Barang dan Jasa	3,996,604,920	1,667,990,036	10.10	
<i>Belanja Modal</i>	<i>1,466,916,800</i>	<i>171,270,000</i>	<i>0.95</i>	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,416,858,800	171,270,000	11.68	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,058,000		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15,347,780,679	15,242,846,536	99.32	99.32
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211,692,500	203,269,839	96.02	96.02

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,833,500	29,928,000	14.14	14.14
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23,197,000	22,485,000	10.62	10.62
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40,852,000	39,910,000	18.85	18.85
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,997,000	3,285,000	1.55	1.55
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,997,000	4,085,000	1.93	1.93
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,020,200	23,329,000	11.02	11.02
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,795,800	80,247,839	37.91	37.91
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,656,013,459	12,512,172,362	98.86	98.86
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,508,420,659	12,366,328,970	97.71	97.71
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,470,200	9,470,200	0.07	0.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21,589,000	21,589,000	0.17	0.17
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	116,533,600	114,784,192	0.91	0.91
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,525,700	2,525,700	100.00	100.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,525,700	2,525,700	100.00	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,770,000	18,521,250	81.34	81.34
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,770,000	18,521,250	81.34	81.34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	479,269,420	466,946,760	97.43	97.43
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,058,000	49,837,900	10.40	10.40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176,252,600	171,270,000	35.74	35.74
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,153,000	3,281,800	0.68	0.68
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,602,620	21,448,000	4.48	4.48
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,975,200	18,975,200	3.96	3.96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,230,000	3,450,000	0.72	0.72
Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,498,000	16,338,000	3.41	3.41

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,500,000	182,345,860	38.05	38.05
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,159,735,000	647,461,149	55.83	55.83
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,159,735,000	647,461,149	135.09	135.09
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308,394,600	284,429,387	92.23	92.23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,840,000	3,840,000	1.25	1.25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,600,000	20,337,987	6.59	6.59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282,954,600	260,251,400	84.39	84.39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507,380,000	460,058,940	90.67	90.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138,910,000	136,787,000	26.96	26.96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344,190,000	304,111,940	59.94	59.94
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,280,000	19,160,000	3.78	3.78
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,630,701,700	2,165,979,550	82.33	82.33
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,527,282,900	1,417,612,050	92.82	92.82
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	584,976,700	584,335,450	38.26	38.26
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	252,300,000	249,792,000	16.36	16.36

Nama Prog/Keg./Sub Keg.	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	78,331,000	62,212,000	4.07	4.07
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	219,680,100	194,137,000	12.71	12.71
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	290,062,500	284,221,000	18.61	18.61
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	49,927,100	42,914,600	2.81	2.81
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52,005,500	-	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1,053,419,000	743,005,300	70.53	70.53
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	177,294,400	175,832,700	16.69	16.69
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	676,124,700	525,333,600	49.87	49.87
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	199,999,900	41,839,000	3.97	3.97
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	49,999,800	5,362,200	10.72	10.72
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	-
Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	49,999,800	5,362,200	10.72	10.72
TOTAL	17,978,482,379	16,761,364,937	93.23	93.23

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021 adalah sebagai berikut:


1. Capaian kinerja yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan gambaran capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2021, yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban bagi Satpol PP Provinsi NTB. LKjIP merupakan perwujudan adanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dilakukan dengan menggerakkan tiap-tiap komponen/ unsur yang dimiliki Satpol PP Provinsi NTB secara efisien dan efektif untuk mencapai kinerja yang seoptimal mungkin melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas pembangunan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. LKjIP Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan yang dicapai tentu saja tidak terlepas dari berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi. Berbagai capaian strategis tersebut tercemin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun telah terjadi perubahan target karena adanya pandemi *Covid-19* dan *refocusing* anggaran tapi tidak merubah kinerja yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi NTB dalam rangka Penegakan Perda/Perkada terutama adanya Perda 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Pergub 50 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penyelenggaraan *good and clean governance* yang diinginkan oleh masyarakat di era reformasi hanya akan terwujud manakala seluruh penyelenggara negara mempunyai komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimanatkan peraturan perundang-undangan, berdaya guna dan berhasil guna serta bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Agar dalam upaya pencapaian target kinerja dari sasaran strategis pada tahun-tahun ke depan dapat lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), pengukuran kinerja (IKU) hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen-dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (*output*), hasil (*outcome*), hingga manfaat (*benefit*) yang mencerminkan kinerja Satpol PP Provinsi NTB yang optimal, efektif dan efisien;
 - b. Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Satpol PP Provinsi NTB memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme *reward and punishment*, agar dapat terfokus terhadap target-target yang ditetapkan hingga tercapai hasil kinerja yang maksimal;
 - c. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal Satpol PP NTB ataupun pihak/lembaga/instansi lain di pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja. Terima kasih.

Mataram, 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19681016 198803 1 003

LAMPIRAN

TABEL 6.2 PERUBAHAN RENSTRA SATPOL PP PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Target
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat NTB				Angka Pelanggaran Tibumtranmas (Public Disorder Rate)	Angka			9	18,349,994,416	7	21,993,642,128	5	25,993,642,128	5	
	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh			Persentase perda/perkada yang dilanggar	%			20.00%	14,979,709,806	17.14%	17,710,837,023	14.29%	20,931,920,083	14.29%	
	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas			Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	%			60.68%	2,159,939,710	61.54%	2,717,451,040	62.39%	3,211,675,876	62.39%	
	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas			Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi >Baik	%			2.56%	1,210,344,900	5.00%	1,565,354,065	7.14%	1,850,046,169	7.14%	
		XXX.D1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD			B	BB	15,485,813,816	BB	18,060,738,462	BB	21,345,458,356	BB	
		XXX.D1.1.D1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		11	11	264,933,700	10	308,985,909	11	365,181,406	32	
		XXX.D1.1.D1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	31,833,500	1	37,126,658	2	43,878,911	4	Sekretariat/Subbag Program
		XXX.D1.1.D1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	1	23,197,000	1	27,054,113	1	31,974,464	3	Sekretariat/Subbag Program
		XXX.D1.1.D1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1	23,197,000	1	27,054,113	1	31,974,464	3	Sekretariat/Subbag Program
		XXX.D1.1.D1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	Dokumen		1	1	3,997,000	1	4,661,607	1	5,509,416	3	Sekretariat/Subbag Program
		XXX.D1.1.D1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1	3,997,000	1	4,661,607	1	5,509,416	3	Sekretariat/Subbag Program
		XXX.D1.1.D1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD	Dokumen		2	2	24,020,200	1	28,014,191	2	33,109,153	5	Sekretariat/Subbag Program
				Jumlah Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen					1					
		XXX.D1.1.D1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6	6	154,692,000	6	180,413,622	6	213,225,581	18	Sekretariat/Subbag Program

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		XXX.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		15	15	13,552,838,206	15	15,806,354,717	15	18,681,068,168	45	
		XXX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	Orang		142	150	13,431,675,406	180	15,665,045,408	200	18,514,058,831	200	
		XXX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Orang		1	1	9,470,200	1	11,044,870	1	13,053,609	1	Sekretariat/Subbag Keuangan
				Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang		8	8		8		8		8	Sekretariat/Subbag Keuangan
		XXX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen		1	1	21,589,000	1	25,178,740	1	29,758,016	3	Sekretariat/Subbag Keuangan
		XXX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Laporan		4	18	90,103,600	4	105,085,698	4	124,197,712	26	Sekretariat/Subbag Keuangan
		XXX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan		12	12	-	12	-	12	-	36	Sekretariat/Subbag Keuangan
		XXX.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		2	2	12,125,700	2	14,141,917	2	16,713,918	6	
		XXX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		1	1	-	1	-	1	-	3	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian BMD SKPD yang Tersusun	Laporan		6	6	-	6	-	6	-	18	
		XXX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD	Dokumen		2	2	12,125,700	1	14,141,917	2	16,713,918	5	Sekretariat/Subbag Umum
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan					1					
		XXX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Tenaga Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang		2	2	-	2	-	2	-	2	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		XXX.DI.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		142	200	154,830,000	200	180,574,568	200	213,415,798	200	
		XXX.DI.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel		142	600	124,470,000	600	145,166,418	600	171,567,942	1800	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	Orang			30	30,360,000	50	35,408,150	60	41,847,857	140	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Teknis Fungsional
		XXX.DI.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		8	8	649,592,110	8	757,603,917	8	895,389,903	8	
		XXX.DI.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Jenis		5	5	23,023,400	5	26,851,647	5	31,735,176	5	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Unit/ Buah		55	34	121,542,100	20	141,751,677	17	167,532,160	71	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Jenis		0	11	33,851,100	5	39,479,737	5	46,659,947	21	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis		32	30	28,933,510	30	33,744,469	30	39,881,600	30	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis		10	9	21,656,000	9	25,256,881	9	29,850,368	9	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	Exemplar		5475	5475	16,920,000	5600	19,733,396	5600	23,322,323	16675	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak		1367	1110	28,666,000	1200	33,432,478	1200	39,512,867	3510	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	Jenis		2	5	375,000,000	5	437,353,632	5	516,895,462	5	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.DI.1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Buat/Set/Unit		219	92	-	54	-	44	-	190	
		XXX.DI.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Tersedia	Unit		6	1	-	1	-	1	-	3	Sekretariat/Subbag Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		X.XX.OI.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia	Unit		27	2	-	9	-	7	-	18	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.07.04		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Tersedia	Unit		0	-	-	5	-	5	-	10	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Tersedia	Buat/Set/Unit		186	54	-	22	-	25	-	101	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Tersedia	Buah		0	2	-	2	-	1	-	5	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Buah/Unit		0	33	-	20	-	10	-	63	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.OI.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jasa		5	9	312,214,100	9	364,127,922	9	430,352,137	9	
		X.XX.OI.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Surat		900	600	4,539,500	1000	5,294,312	1500	6,257,192	1500	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening		4	6	24,720,000	6	28,830,351	6	34,073,749	6	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	Orang		4	5	282,954,600	9	330,003,259	9	390,021,196	9	Sekretariat/Subbag Umum
		XXX.OI.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit		219	103	539,280,000	171	628,949,512	208	743,337,026	482	
		X.XX.OI.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	Unit		6	20	168,340,000	6	196,330,961	6	232,037,819	6	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	Unit		27	16	272,860,000	40	318,230,166	50	376,106,922	50	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Terpelihara	Unit		0	17	-	22	-	27	-	30	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Terpelihara	Unit		186	50	-	30	-	30	-	110	Sekretariat/Subbag Umum

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Target
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.OI.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	Unit		0	66	54.510,000	73	63.573,724	95	75.135,924	234	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	Gedung		0	1	43.570,000	1	50.814,661	1	60.056,361	1	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit		0	-	-	3	-	4	-	7	Sekretariat/Subbag Umum
		X.XX.OI.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Terpelihara	Unit		0	-	-	2	-	3	-	5	Sekretariat/Subbag Umum
		1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100	100	2,864,180,600	100	3,932,903,666	100	4,648,183,772	100	
				Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100	100	100		100		100		100	
		1.05.02.1.01.	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	21	20	17	1,453,974,100	16	1,996,501,222	15	2,359,606,380	15	
		1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Penamanan, dan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	Kali			12	61.390,300	12	84.297,106	12	99.628,283	36	Bidang Tibuntranmas/Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan
				Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	Kabupaten/Kota			10	414.000,000	10	568.477,462	10	671.866,879	10	Bidang Tibuntranmas/Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
				Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah		8	10	31,197,400	10	42,838,210	10	50,629,227	30	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi
				Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat	Kegiatan			10	94,327,000	10	129,523,608	10	153,080,162	30	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi
		1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus		20	17	252,300,000	16	346,441,700	15	409,449,308	15	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan
		1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali			2	36,932,900	2	50,713,819	2	59,937,179	6	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Operasi, Pengendalian, Pengamanan dan
				Jumlah Rakor Satgas Linmas yang Dilaksanakan	Kali			1	34,981,400	1	48,034,149	2	56,770,155	4	Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Potensi Masyarakat
		1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi	Orang			100	39,405,100	100	54,108,481	100	63,949,231	300	Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan Operasional
				Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan	Orang		400	400	130,275,000	600	178,885,027	700	211,418,980	2100	Bidang Perlindungan Masyarakat/ Seksi Bina Pelindungan Masyarakat dan
		1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi	Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	Orang			675	112,870,000	725	154,985,631	725	183,172,982	725	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas
				Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan	Orang			50	144,362,400	60	198,228,915	80	234,280,955	170	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Teknis Fungsional

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama			1	49.927.100	1	68.556.597	1	81.025.036	3	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS
		1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Tibum yang diadakan dan dipelihara	Jenis			5	-	6	-	6	-	6	Sekretariat/ Subbag Umum
		1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Tersusun	SOP			1	-	1	-	-	-	2	Sekretariat/ Subbag Umum
		1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali			12	52.005.500	12	71.410.518	12	84.398.002	36	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan
		1.05.02.1.02.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	22	21	18	1,245,480,000	17	1,710,210,892	16	2,021,248,215	16	
		1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB	Kabupaten/ Kota			10	281.406.900	10	386.409.373	10	456.685.932	10	Bidang Sumber Daya Aparatur/ Seksi Data dan Pengembangan Kapasitas
				Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	Kali		0	10	68.794.300	10	94.463.790	10	111.643.990	30	Bidang Tibumtranmas/ Seksi Deteksi Dini dan Sosialisasi
		1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali			12	685.853.000	12	941.768.050	12	1.113.048.103	36	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan
				Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali		12	9.425.900	12	12.943.023	12	15.296.981	36	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan	
		1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus			18	199.999.900	17	274.626.656	16	324.573.209	16	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Pengawasan dan
		1.05.02.1.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang			43	164,726,500	43	226,191,552	45	267,329,178	131	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Awal (2017)	Data Capaian Awal (2018)	Pendanaan						Penanggungjawab/ Pelaksana	
								2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	.	30	40	114.726.700	40	157.535.129	40	186.186.159	120	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS
				Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang			3		3		5		11	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS
		1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas			1	49.999.800	2	68.656.424	2	81.143.018	5	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS
				Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali			1		2		2		5	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS
				Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis			4		4		4		12	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah/ Seksi Kerjasama dan Pembinaan PPNS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Tugas : Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Kepala Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Fungsi :
1. Perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi pada bidang Kesekretariatan;
 2. Perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi pada bidang Tibumtran;
 3. Perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi pada bidang Penegakan Perda;
 4. Perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi pada bidang Pembinaan Masyarakat;
 5. Perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi pada bidang Pembinaan Satlinmas;

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	Formula: $\frac{\Sigma \text{Perda/perkada yang dilanggar}}{\Sigma \text{Perda/perkada}} \times 100\%$
2.	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase perda/perkada yang dilanggar	Formula: $\frac{\Sigma \text{Perda/perkada yang dilanggar}}{\Sigma \text{Perda/perkada}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	Formula: $\frac{\Sigma \text{Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi} \geq \text{Baik}}{\Sigma \text{Anggota Satlinmas yang dievaluasi}} \times 100\%$

Mataram,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


TRI BUDIPRAYITNO

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 198803 1 003

**RENCANA KERJA TAHUNAN
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	20.00%
2	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	60.68%
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	2.56%

Mataram, 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ,



TRI BUDIPRAYITNO

Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kode Post : 83121
Telp/Fax (0370) 647808 Email. satpolpp@ntbprov.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Budiprayitno
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,

2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 198803 1 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SATPOL PP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	20.00%
2	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibumtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibumtranmas	60.68%
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi \geq Baik	2.56%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15,347,780,679.00	Sumber Dana: APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1, Indikator Kinerja No. 1 dan No. 2
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,630,701,700.00	Sumber Dana: APBD Mendukung Sasaran Strategis No. 1, Indikator Kinerja No. 1 dan No. 2

Mataram,

2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 198803 1 003

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Unit Kerja/Perangkat Daerah
Triwulan/Tahun Anggaran

: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB
: IV (Empat) TA. 2021

A.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Fisik (%)
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		(Rp)	Realisasi	%	
1	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	20.00	18.92	94.59					
2	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibuntranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibuntranmas	%	60.68	53.85	88.74					
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlimas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%	2.56	2.56	100					
							PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,661,636,800	2,165,979,550	81.38	81.38
							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,301,036,100	1,417,612,050	108.96	108.96
							Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	447,976,700	584,335,450	130	130

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	252,300,000	249,792,000	99.01	99.01
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	71,914,300	62,212,000	87	87
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169,680,100	194,137,000	114	114
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	257,232,400	284,221,000	110	110
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	49,927,100	42,914,600	86	86
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-	-
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			-	-
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52,005,500	-	-	-
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1,195,874,200	743,005,300	62.13	62.13
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	350,201,200	175,832,700	50	50
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	645,673,100	525,333,600	81.36	81.36

						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	199,999,900	41,839,000	21	21
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	164,726,500	5,362,200	3.26	3.26
						Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	114,726,700	-	-	-
						Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	49,999,800	5,362,200	11	11

B. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET

No	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Membentuk Tim Terpadu Lintas SKPD dengan Keputusan Gubernur, yaitu :
a	Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan, Pencegahan dan Pembentukan Cukai Rokok/Tembakau Ilegal di Wilayah Provisin Nusa Tenggara Barat, keanggota lintas sektor (Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Prov. NTB, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. NTB, Kasat Pol PP Prov. NTB dan staf, Kepala Bappeda Prov. NTB dan staf, Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB dan staf, Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Direktur Ops Polda NTB Kabid. Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Kasubsi. Penyelidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram)
2	Membuat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tentang Penyelenggaraan Keamanan, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	Menggelar Operasi Gabungan (OPGAB) :
a	OPGAB dalam rangka pencegahan penyakit masyarakat secara berkala dan situasional
b	OPGAB dalam rangka Penanggulangan Penyakit Menular (COVID-19)
4	Meningkatkan pembinaan dalam rangka pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja melalui rapat internal
5	Meningkatkan pembinaan disiplin seluruh anggota dan jajaran struktural, serta memberikan penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>)

C. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET

No	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN PERMASALAHAN	UPAYA KEDEPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA SKPD
	Kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang masih kurang	Membentuk satuan tugas (SATGAS) penyelenggaraan tibatranmas yang beranggotakan para Kasat POLPP Kab/Kota se NTB dan Polri serta POLPP Provinsi NTB	Membentuk pengamanan lingkungan binaan dengan fasilitasi POLPP Provinsi NTB Memfasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PPNS Lingkup Prov. NTB Mengembangkan SMS Pengaduan Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum melalui NTB Care Memfasilitasi Peningkatan Peran dan Fungsi PPNS Lingkungan Prov. NTB
	Sarana prasarana penunjang tugas lapangan masih belum memadai akibat pelaksanaan tugas belum optimal dan personil sering dihadapkan pada resiko tugas yang tinggi	Melakukan koordinasi dengan yang intensif dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan dan instansi terkait Berupaya secara bertahap memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	Mengusulkan penambahan rencana alokasi anggaran peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas pada kesempatan reuvi dan revisi RPJMD
	Kwalitas dan kuantitas SDM POLPP masih belum memadai khususnya dalam menjangkau cakupan wilayah tugas Provinsi NTB	Melakukan sinergitas dengan POLPP Kab/Kota se NTB Mendorong dan memfasilitasi anggota POLPP menjadi tenaga fungsional POLPP Melibatkan anggota POLPP dalam kegiatan yang memfasilitasi pengembangan diri (Diklat, Bimtek dll).	Mengusulkan penambahan jumlah anggota POLPP sesuai Permendagri No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah POLPP Sebanyak Paling Sedikit menjadi 300 orang dari 141 orang dengan Provorsi kelompok umur dibawah 40 tahun.

D. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI SKPD ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL BESERTA JENIS PENGHARGAAN YANG DITERIMA

- NIHIL -

Mataram, 2021
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 198803 1 003

**LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode dan Urusan : 1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Kode Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTB
Jenis Belanja : Belanja Operasi dan Belanja Modal
Bulan : Desember 2021

KODE REK. PROG./ KEG.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)
				s.d Bulan Lalu			Bulan Ini			s.d. Bulan ini			
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17,978,482,379	100%	13,981,373,729	77.77	77.77	2,779,991,208	15.46	15.46	16,761,364,937	93.23	93.23	1,217,117,442
51	Belanja Operasi	16,511,565,579	91.84	13,869,473,729	84.00	84.00	2,073,160,059	12.56	12.56	15,942,633,788	96.55	96.55	568,931,791
51.01	Belanja Pegawai	12,514,960,659	75.80	11,392,829,221	91.03	91.03	973,499,749	7.78	7.78	12,366,328,970	98.81	98.81	148,631,689
51.02	Belanja Barang dan Jasa	3,996,604,920	24.20	2,476,644,508	61.97	61.97	1,099,660,310	27.51	27.51	3,576,304,818	89.48	89.48	420,300,102
52	Belanja Modal	1,466,916,800	8.16	111,900,000	7.63	7.63	706,831,149	48.18	48.18	818,731,149	55.81	55.81	598,127,651
52.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,416,858,800	7.88	111,900,000	7.90	7.90	706,831,149	49.89	49.89	818,731,149	57.78	57.78	598,127,651
52.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,058,000	0.28	-	-	-	49,837,900	99.56	99.56	49,837,900	99.56	99.56	220,100
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15,347,780,679	85.37	12,728,457,279	82.93	82.93	1,866,928,108	12.16	12.16	14,595,385,387	95.10	95.10	752,395,292
1.05.01.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211,692,500	1.38	151,525,839	72	72	51,744,000	24.44	24.44	203,269,839	96.02	96.02	8,422,661
1.05.01.101.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,833,500	15.04	27,534,000	86.49	86.49	2,394,000	7.52	7.52	29,928,000	94.01	94.01	1,905,500
1.05.01.101.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23,197,000	10.96	3,285,000	14.16	14.16	19,200,000	82.77	82.77	22,485,000	96.93	96.93	712,000
1.05.01.101.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40,852,000	19.30	39,910,000	97.69	97.69	-	-	-	39,910,000	97.69	97.69	942,000
1.05.01.101.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3,997,000	1.89	3,285,000	82.19	82.19	-	-	-	3,285,000	82.19	82.19	712,000
1.05.01.101.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,997,000	2.36	4,085,000	81.75	81.75	-	-	-	4,085,000	81.75	81.75	912,000

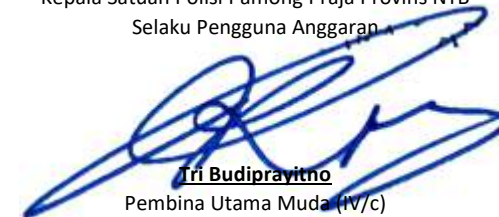
KODE REK. PROG./ KEG.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)
				s.d Bulan Lalu			Bulan Ini			s.d. Bulan ini			
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.01.101.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,020,200	11.35	23,329,000	97.12	97.12	-	-	-	23,329,000	97.12	97.12	691,200
1.05.01.101.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82,795,800	39.11	50,097,839	60.51	60.51	30,150,000	36.41	36.41	80,247,839	96.92	96.92	2,547,961
1.05.01.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,656,013,459	82.46	11,514,688,213	90.98	90.98	997,484,149	7.88	7.88	12,512,172,362	98.86	98.86	143,841,097
1.05.01.102.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,508,420,659	98.83	11,392,829,221	91.08	91.08	973,499,749	7.78	7.78	12,366,328,970	98.86	98.86	142,091,689
1.05.01.102.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9,470,200	0.07	8,380,200	88.49	88.49	1,090,000	11.51	11.51	9,470,200	100.00	100.00	-
1.05.01.102.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21,589,000	0.17	21,589,000	100.00	100.00	-	-	-	21,589,000	100.00	100.00	-
1.05.01.102.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	116,533,600	0.92	91,889,792	78.85	78.85	22,894,400	19.65	19.65	114,784,192	98.50	98.50	1,749,408
1.05.01.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,525,700	0.02	2,525,700	100.00	100.00	-	-	-	2,525,700	100.00	100.00	-
1.05.01.103.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,525,700	100	2,525,700	100.00	100.00	-	-	-	2,525,700	100.00	100.00	-
1.05.01.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,770,000	0.15	18,521,250	81.34	81.34	-	-	-	18,521,250	81.34	81.34	4,248,750
1.05.01.105.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.01.105.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,770,000	100.00	18,521,250	81.34	81.34	-	-	-	18,521,250	81.34	81.34	4,248,750
1.05.01.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	479,269,420	3.12	357,738,860	74.64	74.64	109,207,900	22.79	22.79	466,946,760	97.43	97.43	12,322,660
1.05.01.106.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,058,000	10.44	-	-	-	49,837,900	99.56	99.56	49,837,900	99.56	99.56	220,100
1.05.01.106.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176,252,600	36.78	111,900,000	63.49	63.49	59,370,000	33.68	33.68	171,270,000	97.17	97.17	4,982,600
1.05.01.106.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,153,000	0.87	3,281,800	79.02	79.02	-	-	-	3,281,800	79.02	79.02	871,200

KODE REK. PROG./ KEG.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)
				s.d Bulan Lalu			Bulan Ini			s.d. Bulan ini			
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.01.106.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,602,620	5.13	21,448,000	87.18	87.18	-	-	-	21,448,000	87.18	87.18	3,154,620
1.05.01.106.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,975,200	3.96	18,975,200	100.00	100.00	-	-	-	18,975,200	100.00	100.00	-
1.05.01.106.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,230,000	0.88	3,450,000	81.56	81.56	-	-	-	3,450,000	81.56	81.56	780,000
1.05.01.1.6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,498,000	3.86	16,338,000	88.32	88.32	-	-	-	16,338,000	88.32	88.32	2,160,000
1.05.01.106.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,500,000	38.08	182,345,860	99.92	99.92	-	-	-	182,345,860	99.92	99.92	154,140
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,159,735,000	7.56	-	-	-	647,461,149	-	-	647,461,149	-	-	512,273,851
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,159,735,000	100.00	-	-	-	647,461,149	55.83	55.83	647,461,149	55.83	55.83	512,273,851
1.05.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308,394,600	2.01	260,093,477	84.34	84.34	24,335,910	7.89	7.89	284,429,387	92.23	92.23	23,965,213
1.05.01.108.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,840,000		3,840,000	100.00	100.00	-	-	-	3,840,000	100.00	100.00	-
1.05.01.108.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,600,000		18,702,077	86.58	86.58	1,635,910	7.57	7.57	20,337,987	94.16	94.16	1,262,013
1.05.01.108.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	282,954,600		237,551,400	83.95	83.95	22,700,000	8.02	8.02	260,251,400	91.98	91.98	22,703,200
1.05.01.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507,380,000	3.31	423,363,940	83.44	83.44	36,695,000	7.23	7.23	460,058,940	90.67	90.67	47,321,060
1.05.01.109.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138,910,000	27.38	132,317,000	95.25	95.25	4,470,000	3.22	3.22	136,787,000	98.47	98.47	2,123,000
1.05.01.109.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344,190,000	67.84	271,886,940	78.99	78.99	32,225,000	9.36	9.36	304,111,940	88.36	88.36	40,078,060
1.05.01.109.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,280,000	4.79	19,160,000	78.91	78.91	-	-	-	19,160,000	78.91	78.91	5,120,000
1.05.01.109.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE REK. PROG./ KEG.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)
				s.d Bulan Lalu			Bulan Ini			s.d. Bulan ini			
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	
				Rp	%	(%)	Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,630,701,700	14.63	1,252,916,450	47.63	47.63	913,063,100.00	34.71	34.71	2,165,979,550.00	82.33	82.33	464,722,150
1.05.02.101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,527,282,900	58.06	960,850,450	63	63	456,761,600	30	30	1,417,612,050	93	93	109,670,850
1.05.02.101.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	584,976,700	38.30	342,660,850	58.58	58.58	241,674,600	41.31	41.31	584,335,450	99.89	99.89	641,250
1.05.02.101.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	252,300,000	16.52	129,995,000	51.52	51.52	119,797,000	47.48	47.48	249,792,000	99.01	99.01	2,508,000
1.05.02.101.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	78,331,000	5.13	28,232,000	36.04	36.04	33,980,000	43.38	43.38	62,212,000	79.42	79.42	16,119,000
1.05.02.101.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	219,680,100	14.38	190,577,000	86.75	86.75	3,560,000	1.62	1.62	194,137,000	88.37	88.37	25,543,100
1.05.02.101.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	290,062,500	18.99	226,471,000	78.08	78.08	57,750,000	19.91	19.91	284,221,000	97.99	97.99	5,841,500
1.05.02.101.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	49,927,100	3.27	42,914,600	85.95	85.95	-	-	-	42,914,600	85.95	85.95	7,012,500

KODE REK. PROG./ KEG.	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Bobot (%)	Realisasi Pelaksanaan Anggaran									Sisa Anggaran (Rp)	
				s.d Bulan Lalu			Bulan Ini			s.d. Bulan ini				
				Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan		Fisik		
				Rp	%	(%)	Rp	(%)	(%)	Rp	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.05.02.101.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52,005,500	3.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,005,500
1.05.02.102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1,053,419,000	40.04	286,703,800	27	27	456,301,500	43	43	743,005,300	71	71	310,413,700	
1.05.02.102.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	177,294,400	16.83	97,262,700	54.86	54.86	78,570,000	44.32	44.32	175,832,700	99.18	99.18	1,461,700	
1.05.02.102.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	676,124,700	64.18	147,602,100	21.83	21.83	377,731,500	55.87	55.87	525,333,600	77.70	77.70	150,791,100	
1.05.02.102.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	199,999,900	18.99	41,839,000	20.92	20.92	-	-	-	41,839,000	20.92	20.92	158,160,900	
1.05.02.103	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	49,999,800	1.90	5,362,200	11	11	-	-	-	5,362,200	11	11	44,637,600	
1.05.02.103.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.05.02.103.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	49,999,800	100.00	5,362,200	10.72	10.72	-	-	-	5,362,200	10.72	10.72	44,637,600	
JUMLAH BELANJA		17,978,482,379	1.00	13,981,373,729	77.77	77.77	2,779,991,208	15.46	15.46	16,761,364,937	93.23	93.23	1,217,117,442	

Mataram, Januari 2022
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provins NTB
Selaku Pengguna Anggaran



Tri Budiprayitno
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681016 198803 1 003

**RENCANA AKSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB
TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran								Penanggungjawab/ Pelaksana	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	APBD				APBN				
					Rencana Aksi per Triwulan						Rencana Aksi per Triwulan				Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	I	II	III		IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Menurunnya perda/perkada yang dilanggar oleh masyarakat	Persentase perda/perkada yang dilanggar	%	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,161,937,900	252,298,060	345,195,890	337,896,690	226,547,260					
									Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	101,932,600	13,415,900	17,772,650	10,473,450	60,270,600					
									Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	49,927,100	13,415,900	17,772,650	10,473,450	8,265,100	-	-	-	-	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga
									Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	52,005,500	-	-	-	52,005,500	-	-	-	-	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	895,278,800	232,620,180	268,355,650	323,226,310	71,076,660	-	-	-	-	
									Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	695,278,900	192,415,780	208,356,450	238,251,310	56,255,360	-	-	-	-	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan
									Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	199,999,900	40,204,400	59,999,200	84,975,000	14,821,300	-	-	-	-	Bidang Penegakan/ Seksi Penegakan
									Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	164,726,500	6,261,980	59,067,590	4,196,930	95,200,000	-	-	-	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran								Penanggungjawab/ Pelaksana	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	APBD				APBN				
					Rencana Aksi per Triwulan						Rencana Aksi per Triwulan				Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	I	II	III		IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	114,726,700	-	19,776,700	-	94,950,000	-	-	-	-	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga
									Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	49,999,800	6,261,980	39,290,890	4,196,930	250,000	-	-	-	-	Bidang Penegakan/ Seksi Hubungan Antar Lembaga
2	Terwujudnya wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	Persentase wilayah bebas gangguan tibusmtranmas	%	60.68	15.2	15.2	15.2	15.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	958,761,900	317,717,640	322,278,610	207,666,610	111,099,040	-	-	-	-	
									Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	890,147,600	293,170,780	296,513,320	196,781,320	103,682,180	-	-	-	-	
									Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	600,914,700	169,912,880	236,138,320	118,236,320	76,627,180	-	-	-	-	Bidang Tibumtran/ Seksi Opdal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran								Penanggungjawab/ Pelaksana	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	APBD				APBN				
					I	II	III	IV			Rencana Aksi per Triwulan				Rencana Aksi per Triwulan				
											I	II	III	IV	I	II	III		IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	252,300,000	86,325,000	60,375,000	78,545,000	27,055,000	-	-	-	-	Bidang Tibumtran/ Seksi Opdal
									Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	36,932,900	36,932,900	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Tibumtran/ Seksi Tibum Bidang Linmas/ Seksi Datin
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	68,614,300	24,546,860	25,765,290	10,885,290	7,416,860	-	-	-	-	
									Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	68,614,300	24,546,860	25,765,290	10,885,290	7,416,860	-	-	-	-	Bidang Binmas/ Seksi Binluh
3	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas	Persentase peningkatan Anggota Satlinmas dengan nilai evaluasi ≥Baik	%	2.56	0	0	0	2.56	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	743,480,800	276,607,500	44,955,000	115,257,100	306,661,200	-	-	-	-	
									Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	461,893,900	276,607,500	44,955,000	97,581,400	42,750,000	-	-	-	-	
									Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	34,981,400	-	-	34,981,400	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja							Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran								Penanggungjawab/ Pelaksana	
		Uraian	Satuan	Target Kinerja	Rencana Aksi per Triwulan					(Rp)	APBD				APBN				
					Rencana Aksi per Triwulan						Rencana Aksi per Triwulan				Rencana Aksi per Triwulan				
					I	II	III	IV			I	II	III	IV	I	II	III		IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
									Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169,680,100	40,125,100	42,705,000	50,850,000	36,000,000	-	-	-	-	Bidang Linmas/ Seksi Datin
									Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	257,232,400	236,482,400	2,250,000	11,750,000	6,750,000	-	-	-	-	Bidang Linmas/ Seksi Mobilisasi
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	281,586,900	-	-	17,675,700	263,911,200	-	-	-	-	
									Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	281,586,900	-	-	17,675,700	263,911,200	-	-	-	-	Bidang Binmas/ Seksi Wasdin
Jumlah Sasaran										2,864,180,600	846,623,200	712,429,500	660,820,400	644,307,500	-	-	-	-	

Mataram, 2021


KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI NTB,

TRI BUDIPRAYITNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 198803 1 003









**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln. Pejanggik No. 12 Mataram

	NOMOR SOP	: / / POLPP/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	KASAT POLPP PROV. NTB,  TRI BUDIPRAYITNO Pembina Tk. I NIP. 19681016 198803 1 003
	NAMA SOP	: PENGUMPULAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaannya 2. Memahami pengelolaan keuangan dan asset daerah 3. Memiliki kompetensi pengelolaan data sederhana 4. Mengungsi aplikasi SIMDA 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Individu 2. SOP Penyusunan Laporan CIK 3. SOP Penyusunan Laporan Pemantauan Rencana Aksi 4. SOP Penyusunan LKjIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. APBD 2. Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja) 3. Perangkat Pengolah Data 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	- Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja	

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Satuan	Sekretaris/ Kabid	Kasubbag Program	Kasubbag/ Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Sekretaris menugaskan Kasubbag Program untuk melaporkan data kinerja					Instruksi	5 Menit	Disposisi	
2.	Menyiapkan kertas kerja laporan kinerja dan mengirim ke setiap bidang untuk diisi					DPA, laporan kinerja periode sebelumnya	30 Menit	Kertas kerja laporan kinerja per bulan	
3.	Menerima kertas kerja laporan kinerja, mengukur dan mengisi data capaian kinerja dan menyerahkan kepada Kabid					Kertas kerja laporan kinerja, SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran, data pendukung laporan kinerja	5 Menit	Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja per bidang	
4.	Memeriksa kertas kerja laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani kertas kerja laporan kinerja. Jika Tidak, menugaskan Kasubbag/Kasi untuk menyempurkan . selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Program					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran, data pendukung laporan kinerja	45 Menit	Kertas kerja laporan kinerja per bidang yang ditandatangani	
5.	Menerima berkas kertas laporan kinerja dan menginput data capaian kinerja pada laporan kinerja. Menyerahkan kepada Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf					Kertas kerja laporan kinerja yang sudah terisi data capaian kinerja, SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran, data pendukung laporan kinerja	45 Menit	Draft laporan laporan kinerja	
6.	Sekretaris menerima dan memeriksa draft laporan laporan kinerja. Jika Ya, menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani. Jika Tidak, menugaskan Kasubbag Program untuk menyempurnakan					Draf laporan laporan kinerja	15 Menit	Draft laporan laporan kinerja yang sudah di paraf	
7.	Memeriksa draft laporan kinerja. Jika Ya, menandatangani laporan kinerja, Jika Tidak, menugaskan Sekretaris untuk menyempurnakan.					Draf laporan laporan kinerja yang sudah diparaf	5 Menit	Laporan kinerja SKPD	
8.	Mengirimkan/mendokumentasikan laporan kinerja SKPD					Laporan kinerja SKPD	10 Menit	Terkirimnya laporan laporan kinerja	

**ADMINISTRATOR SAKIP
SATPOL PP PROVINSI NTB
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP	KETERANGAN